

*POLICY OF LOCAL GOVERNMENT OF KAMPAR REGENCY IN EMPOWERMENT OF
KERAMBA FARMER IN KOTO PANJANG HYDROPOWER RESERVOIR
YEAR 2014-2015*

*By:
Rivaldi Afriliska*

Supervisor: Drs. H. Ishak, M. Si

*Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau*

*Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau
Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Tel / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

Researchers formulate the problem of research that is why there is no policy of Kampar regency government in empowering keramba farmers in Koto Panjang hydropower reservoir. This research uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as problem-solving process investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the study which then continued with based on the existing theories. Based on the results of the research is known Empowerment of fishery business by the Regional Government of Kampar regency on fish farmers in Koto Panjang hydropower dam does not run as empowerment in other areas. It is seen that there is no assistance and programs that run and is destined for fish farmers in Koto Panjang hydropower reservoir. Empowerment of fishery business is not maximally done by local government especially in fishery potential in Koto Panjang hydropower reservoir, less maximal cost or budget for empowering fishery business

Keywords: Policy, Empowerment, Fish Farmers

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
PEMBERDAYAAN PETANI KERAMBA DI WADUK PLTA KOTO PANJANG
TAHUN 2014-2015**

Oleh :
Rivaldi Afriliska

Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu mengapa tidak ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan petani keramba di waduk PLTA Koto Panjang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak selama penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan berdasarkan teori-teori yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar pada petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang tidak berjalan sebagaimana dengan pemberdayaan di daerah lainnya. Hal ini terlihat tidak adanya bantuan dan program yang berjalan serta diperuntukkan bagi petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang. Pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan belum maksimal dilakukukan pemerintah daerah terutama pada potensi perikanan yang ada di waduk PLTA Koto Panjang, kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan

Kata Kunci : *Kebijakan, Pemberdayaan, Petani Ikan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Riau memiliki empat buah sungai besar yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan sungai Indragiri. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 329.867.61 km yang terdiri dari 94.561.61 km daratan dan perairan lautnya 235.306 km dengan perkiraan potensi sumber daya perikanan sebanyak 446.357.6 ton/tahun (BPS Riau, 2016).

Sungai Kampar menjadi salah satu sungai besar di Riau dan memiliki potensi untuk pengembangan budidaya ikan air tawar. Dimana sungai Kampar berada mengalir dua Kabupaten yakni Kabupaten Kampar di hulunya dan Kabupaten Pelalawan di hilirnya. Dimana secara geografis, Kabupaten Kampar mempunyai letak geografis yang strategis, yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak disebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat disebelah barat, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Potensi di sungai kampar yang pantas untuk dikembangkan dan sebagian telah diberdayakan yakni adanya sebuah waduk buatan yang digunakan sebagai penggerak pembangkit listrik (PLTA). Pada waduk tersebut sangat cocok untuk pengembangan budidaya air tawar, sebagaimana mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai salah satu kabupaten minapolitan yang ditetapkan oleh ditjen perikanan budidaya. Kabupaten Kampar adalah sekian dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 2.112 hektar kolam ikan dan 1.410 kerambah sungai dan waduk. Sayangnya potensi perikanan khususnya budidaya perikanan di Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal. Potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar.

Waduk PLTA Koto Panjang dibangun pada tahun 1992 dengan luas genangan 12.400 ha dan kedalaman 73-85 m. Pasokan air waduk berasal dari Sungai Kampar dan Batang Mahat yang hulunya di Propinsi Sumatera Barat (PLN. 2002). Tujuan pembangunan waduk selain untuk pembangkit tenaga listrik (PLTA) juga bertujuan untuk pengendalian banjir di daerah hilir, pariwisata dan kegiatan perikanan seperti keramba jaring apung (KJA).

Pemanfaatan waduk untuk kegiatan perikanan KJA telah dimulai dari tahun 2006 dan sampai saat ini jumlahnya terus mengalami

peningkatan. Adapun peningkatan jumlah keramba jaring apung (KJA) di waduk PLTA Koto Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Jumlah Keramba Jaring Apung di Waduk PLTA Koto Panjang Tahun 2010-2015

No.	Tahun	Jumlah KJA (Unit)
1	2010	762
2	2011	911
3	2012	1.040
4	2013	2.154
5	2014	2.154
6	2015	1.206
7	2016	1.206

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2016

Pada awal dimulainya budidaya ikan air tawar dalam keramba di PLTA Koto Panjang pada tahun 2006 jumlah keramba sebanyak 530 unit. Namun, seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah KJA di PLTA Koto Panjang. Sementara pada tahun 2016 jumlahnya lebih 1.206 unit. Keadaan ini menunjukkan peningkatan jumlah keramba di perairan waduk PLTA cukup tinggi. Peningkatan jumlah KJA yang tinggi ini diduga karena usaha tersebut menguntungkan secara ekonomis.

Kampar memiliki potensi pengembangan budidaya air tawar terutama budidaya kolam, keramba dan jaring apung. Volume produksi ikan secara keseluruhan di Kampar mencapai kisaran 60 ton per hari, dan 30 ton (50%) di antaranya adalah ikan patin. Seluruh produsen adalah pembudidaya skala kecil, bukan korporasi dengan perputaran uang lebih kurang Rp. 1.000.000.000,-/perhari (Wawancara dengan Pegawai Dinas Perikanan Kampar, 2016).

Permasalahan dalam jangka panjang adalah kesulitan dalam mendapatkan bibit ikan dan semakin mahalnya harga pakan ikan. Untuk mengantisipasi hal ini sebaiknya pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kampar mengembangkan *hutchery* yang dapat memenuhi kebutuhan bibit ikan nila maupun ikan mas untuk petani ikan di Kabupaten Kampar.

Bantuan fasilitas perikanan diberikan pemerintah Kabupaten Kampar dikarenakan besarnya kebutuhan akan ikan di Kabupaten Kampar setiap tahunnya. Dimana seiring pertumbuhan penduduk, tentunya kebutuhan akan protein yang berasal dari ikan semakin tinggi. Adapun jumlah kebutuhan ikan dan

jumlah produksi ikan di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel 2 : Perbandingan Jumlah Penduduk dan Produksi Ikan di Kabupaten Kampar Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah Penduduk	Produksi (Ton)	Kebutuhan Ikan (Ton/Tahun)	
			Konsumsi	Industri
2010	677.524	42.256	21.784	20.472
2011	697.841	72.917	23.824	49.093
2012	718.782	117.066	25.970	91.096
2013	733.506	193.303	28.220	165.083
2014	753.376	306.931	30.564	276.367
2015	773.171	318.278	31.682	290.680
2016	773.171	224.635	31.682	290.680

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2016.

Data di atas, memperlihatkan pertumbuhan produksi ikan setiap tahunnya di Kabupaten Kampar selalu meningkat untuk mengimbangi jumlah pertumbuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah maupun mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan akan ikan. Besarnya kebutuhan terhadap ikan, memberi dampak pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat petani ikan. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut belum berdampak kepada pemasukan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Perkembangan produksi ikan yang diusahakan pada wilayah PLTA Koto Panjang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap produksi ikan di Kabupaten Kampar. Adapun jumlah produksi ikan yang berasal dari PLTA Koto Panjang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Produksi Ikan Berasal dari Petani Ikan PLTA Koto Panjang Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah KJA (Unit)	Produksi (Ton)
2010	762	3.600
2011	911	3.960

2012	1.040	4.104
2013	2.154	4.284
2014	2.154	9.245
2015	1.206	6.230
2016	1.206	4.120

Sumber: Data Olahan Lapangan, 2016.

Data yang dipaparkan pada tabel di atas menggambarkan kontribusi produksi ikan yang berasal dari PLTA Koto Panjang terhadap produksi ikan di Kabupaten Kampar setiap tahunnya terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2014 dan pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan dikarenakan pengaruh musim yang tidak menentu menyebabkan kekeringan di beberapa titik PLTA Koto Panjang. Selain itu terjadinya penurunan produksi dikarenakan ketergantungan petani pada bibit ikan yang cukup besar, sedangkan bibit ikan harus didatangkan dari luar daerah dengan harga yang terus meningkat.

Sementara itu, petani keramba di PLTA Koto Panjang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bila dibandingkan petani keramba lainnya di Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan petani jaring apung keramba yang berada di PLTA Koto Panjang seharusnya dibawah binaan manajemen PLTA Koto Panjang melalui program CSR, sehingga anggapan tersebut menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Kampar kurang memberikan perhatian terhadap pembinaan jaring apung keramba di PLTA Koto Panjang. Padahal besarnya produksi ikan yang disumbangkan dari petani keramba PLTA Koto Panjang cukup besar dan bila diberdayakan dengan baik bisa dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari segi budidaya perikanan.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis, tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Keramba Di Waduk PLTA Koto Panjang Tahun 2014-2015

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu “Mengapa tidak ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan petani keramba di waduk PLTA Koto Panjang.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan mengapa tidak ada kebijakan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kampar dalam pemberdayaan petani keramba di waduk PLTA Koto Panjang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memberikan gambaran kepada pemerintah tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap petani ikan.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan informasi bagi semua pihak mengenai kebijakan pemerintah daerah.
2. Manfaat akademis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi perkembangan kajian Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

D. Tinjauan Pustaka

a. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007:30).

Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2007:29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

b. Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi.
2. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.
4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan.

Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

c. Kebijakan

Istilah kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris '*policy*' yang dibedakan dari kata 'kebijaksanaan' (*wisdom*) maupun 'kebajikan' (*virtues*).

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (dalam Suharto, 2014:7).

Kebijakan (*business policy*) itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan kongkrit. (Hodgetts dan Wartman 1975: 6 dalam Ndraha 2011: 492).

Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, yang bercirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari membuatnya maupun yang mentaatinya, proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut ini:

- a. Penyusunan Agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian pemerintah.
- b. Formulasi Kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan Kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi Kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mendapat hasil.
- e. Evaluasi Kebijakan, yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. (Micheal Howlet dan M. Ramseh Dalam Subarsono 2009: 39).

d. Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Masyarakat

Korten dalam Hikmat (2001:16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama* memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas. *Kedua* mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. *Ketiga* mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang di organisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang

inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus di capai oleh proses pembangunan.

Pemberdayaan merupakan langkah yang tepat dalam pembangunan lapisan bahwa hanya saja pemberdayaan memerlukan keterlibatan pihak lain selain masyarakat yang diberdayakan itu sendiri dan pihak lain tersebut yang harus benar-benar konsisten dalam program pemberdayaan adalah pemerintah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab besar atas keadaan setiap rakyatnya.

Upaya memberdayakan masyarakat menurut Kartasmita (1996:159) harus dilakukan melalui tiga langkah yaitu:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*);
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*);
3. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang merupakan kawasan waduk PLTA Koto Panjang yang dijadikan lahan perikanan oleh petani ikan jaring keramba apung. Peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini karena potensi ikan yang berasal dari waduk PLTA Koto Panjang sangat besar akan tetapi kontribusi yang diberikan kepada daerah belum ada.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari wawancara dengan informan penelitian. Dalam hal ini untuk memperoleh gambaran peran pemerintah daerah Kabupaten Kampar dalam membuat dan

melaksanakan kebijakan bagi petani ikan maupun kendala atau hambatan yang dihadapi.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data sekunder yang digunakan berupa sejarah singkat Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, kondisi waduk PLTA Koto Panjang, dan keadaan petani ikan jaring keramba apung.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk melengkapi data penelitian ini maka penulis menggunakan informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang akurat dan memadai berkaitan dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar Dalam Pemberdayaan Petani Keramba Di Waduk PLTA Koto Panjang Kampar”

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan menggunakan metode :

- a. Interview (wawancara) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian duna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian (**Marzuki, 2002:62**).
- b. Dokumentasi, yaitu teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang di teliti. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (**Widodo, 2012:61**).

7. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Akan tetapi pada kenyataannya, upaya pemerintah daerah selama ini dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tidaklah mudah.

Upaya memberdayakan masyarakat menurut **Kartasasmita (1996:159)** harus dilakukan melalui tiga langkah yaitu:

4. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*);
5. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*);
6. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*)

Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemasok utama ikan air tawar untuk Kota Pekanbaru. Sebagian besar ikan tawar berasal dari hasil budidaya dalam bentuk pemeliharaan pada jaring apung atau keramba di Waduk PLTA Koto Panjang.

Untuk budidaya keramba dan jaring apung tersedia areal seluas 410 Ha antara lain mencakup: waduk PLTA Koto Panjang seluas 275 Ha, sungai seluas 125 Ha, dan danau lainnya seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut yang baru dimanfaatkan untuk budidaya keramba seluas 35,75 Ha (8,72%) atau 7.150 unit, dengan produksi sebesar 9.014,85 ton atau rata-rata produksi sebesar 252,16 ton/ha/tahun. Selain itu, mata pencaharian sebagian penduduk Kabupaten Kampar yang tinggal di aliran sungai, menjadikan sungai dan waduk tempat mencari ikan melalui penangkapan ikan.

Sementara program yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Perikanan dalam upaya memberdayakan masyarakat petani ikan air tawar dalam hal ini di Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- Program pengembangan sistim penyuluhan perikanan
- Program perlindungan sumberdaya hayati perikanan

- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar

Dengan demikian, jelaslah bahwa pemerintah Kabupaten Kampar belum memberikan perhatian yang lebih kepada para petani ikan air tawar di waduk PLTA Koto Panjang, terlihat belum ada bantuan yang diberikan terutama pada tahun 2014-2015. Sedangkan program kerja yang dirancang sebagaimana tertuang di atas baru akan dilaksanakan pada tahun akan datang 2018 dan tentunya belum ada kepastian pemberdayaan bagi petani di waduk PLTA Koto Panjang.

Perhatian pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili Dinas Perikanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ikan yang ada di waduk PLTA Koto Panjang. Padahal bila dilihat dari kontribusinya, hasil ikan yang dipanen setiap bulannya dari petani waduk PLTA Koto Panjang sangat besar dan mampu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat Kampar terhadap ikan.

Namun pada faktanya dilapangan sejak adanya petani ikan air tawar di PLTA Koto Panjang sampai dengan saat ini belum ada pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Perikanan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu menciptakan suasana bagi masyarakat untuk berkembang terutama dalam meningkatkan hasil produksi ikan air tawar di PLTA Koto Panjang.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*)

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah sesuai dengan sumberdaya alam yang dimiliki adalah dengan mengusulkan Kabupaten Kampar sebagai salah satu kawasan pengembangan Minapolitan. Komitmen tersebut juga sejalan dengan pada visi Pemda Kabupaten Kampar yaitu terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Pusat Agribisnis, antara lain dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi di sektor perikanan air tawar yang berwawasan lingkungan, diversifikasi usaha budidaya, dan peningkatan kualitas hasil produksi sehingga

dapat memberikan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi di pasar.

Kebijakan pembangunan di Kabupaten Kampar sejak lama memang telah dirintis dan diarahkan pada sektor perikanan, yaitu melalui penetapan Kabupaten Kampar sebagai kawasan sentra produksi perikanan air tawar di Provinsi Riau. Dari data Dinas Perikanan Kab. Kampar tercatat bahwa sampai dengan tahun 2014, perkembangan sektor perikanan terutama budidaya keramba mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari jumlah produksi maupun jumlah RTP, dibanding perikanan budidaya kolam dan perikanan tangkap.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra dalam pengembangan komoditas perikanan terutama patin di Indonesia. Sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan dimana berdasarkan indikator makro pembangunan tahun 2009-2013, sektor ini diharapkan dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang besar terutama dalam mendukung kebijakan yang terkait dengan penyediaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan maupun kontribusinya terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian.

Perkembangan sub sektor perikanan di Provinsi Riau dan pangsanya terhadap PDRB pertanian mengalami peningkatan dari 9,13% pada tahun 2009 menjadi 9,35% pada tahun 2010. Berdasarkan indikator makro pembangunan perikanan dan kelautan Prov. Riau, pada kurun waktu tahun 2009-2013, jumlah penyediaan kesempatan kerja terutama di sub sektor perikanan budidaya diharapkan dapat tumbuh sampai 46,41% dan menciptakan kesempatan kerja bagi ±85.075 pembudidaya, sehingga mampu meningkatkan jumlah jangkauan program pengetasan kemiskinan pada RTP sampai dengan 25% pada akhir 2013.

Berkembangnya sektor ini disamping dapat menyediakan peluang kerja juga diharapkan mampu menjadi sektor penyumbang PDRB daerah untuk sektor pertanian dengan target peningkatan sampai dengan 10,00% pada tahun 2013.

Dalam jangka panjang pembangunan dan pengembangan sektor perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Kampar diarahkan pada :

1. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun ekspor dengan meningkatkan dan memperkuat komoditas spesifik daerah, terutama

patin, nila, lele, serta pengembangan budidaya kolam yang ada di pekarangan masyarakat. Pengembangan tersebut juga mempertimbangan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

2. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan melalui pemberdayaan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP), penguatan modal dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang usaha budidaya dan distribusi hasil perikanan.
3. Pengembangan pasca panen dan pengolahan produk hasil perikanan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambahnya.

Beberapa strategi pengembangan yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Optimalisasi potensi perikanan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan mutu benih, mutu hasil produksi perikanan dan pemasaran.
3. Penguatan modal dan peningkatan sarana serta prasarana terkait pengembangan budidaya perikanan, termasuk modernisasi sarana dan teknologi pendukung.

Peluang Investasi disektor perikanan terbuka cukup besar, yaitu usaha perikanan terpadu yang mencakup budi daya kolam ikan, budi daya keramba, pembenihan, pabrik pakan, cold storage dan Filet Ikan. Dalam rangka memanfaatkan potensi yang ada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Propinsi Riau bekerja sama dengan PT Bonecom mendirikan PT. Kamparikom yang bergerak dibidang pembuatan fillet ikan yang berorientasi ekspor, yang nantinya dapat menyerap produksi perikanan budidaya. Untuk mendukung program ini telah dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) calon plasma PT Kamparikom sebanyak 123 KUB setara 2.515 RTP.

Namun khusus bagi para petani ikan air tawar yang berada di waduk PLTA Koto Panjang, kebijakan tersebut seolah-olah tidak pernah sampai bahkan para petani mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah daerah agar dapat memberikan bantuan untuk mempermudah produksi ataupun pada saat panen dengan meminta bantuan dermaga pun belum bisa direalisasikan.

Beberapa kendala mendasar yang dihadapi oleh sektor perikanan dalam upaya mengembangkan budidaya perikanan air tawar

khususnya di Kabupaten Kampar antara lain adalah :

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya yang ada untuk meningkatkan hasil produksi perikanan.
2. Masih tingginya harga pakan ikan. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pakan ikan pabrik menyebabkan harga pakan ikan tidak dapat dikendalikan di tingkat petani. Padahal biaya pakan merupakan komponen biaya produksi yang terbesar ($\pm 60\%$ dari total biaya produksi).

3. Kurang tersedianya bibit/benih ikan berkualitas dalam jumlah yang cukup. Pengadaan bibit/benih merupakan komponen produksi yang penting selain pakan. Ketersediaan bibit /benih dengan kualitas yang baik sangat mempengaruhi hasil produksi perikanan.

Kemampuan nelayan untuk memperoleh bibit/benih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau mengakibatkan jumlah yang diperoleh tidak memadai, atau nelayan hanya mampu membeli bibit dengan kualitas yang lebih rendah. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada biaya produksi dan hasil produksi yang diperoleh oleh nelayan.

4. Masih terbatasnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan dan sistem pemasaran yang terintegrasi. Diversifikasi produk olahan hasil perikanan bertujuan untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penjualan hasil perikanan dalam bentuk ikan mentah/ikan segar. Produk olahan hasil perikanan dapat berbentuk ikan asap, pengalengan, kerupuk ikan, *fillet* ikan, *fish nugget*, tepung ikan, dll.

Dalam proses pengolahan hasil perikanan penggunaan zat-zat kimiawi berbahaya masih cenderung banyak digunakan karena masih sederhananya teknologi yang diterapkan. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan sangat terkait dengan strategi pemasaran yang baik, baik di daerah maupun keluar daerah, serta dukungan lintas sector dalam rangka memperkuat

sistem pemasaran yang terintegrasi tersebut. Tata niaga pemasaran didalam negeri yang efisien juga diperlukan agar pasar tidak hanya dikuasai oleh para pemilik modal besar, dan merugikan pedagang-pedagang kecil. Untuk lebih mengoptimalkan usaha pengolahan hasil perikanan dan dalam rangka mendukung pengembangan kawasan Minapolitan, Pemda Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat sedang menyelesaikan rencana pembangunan Sentra Pengolahan Perikanan Air Tawar dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD TK. I dan APBD TK. II. Lebih lanjut sentra ini juga akan dilengkapi dengan pabrik pengolahan tepung ikan.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta permodalan. Rencana Program Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan sangat mendukung upaya pengembangan kawasan Minapolitan, khususnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif serta meningkatkan minat investor untuk ikut menanamkan modalnya di daerah. Total rencana investasi terkait pengembangan kawasan Minapolitan tersebut mencapai 169 milyar, baik yang bersumber dari APBN, APBD TK. I dan TK II, maupun peran serta swasta/investor.

Keterbatasan ini seharusnya bisa dimaksimal pemerintah daerah dengan menggalang seluruh elemen masyarakat terutama para petani ikan yang berada di waduk PLTA Koto Panjang untuk bersama-sama mencari cara atau solusinya agar potensi perikanan yang ada khususnya di waduk PLTA Koto Panjang bisa semakin berkembang dan menjadi sentral industri perikanan Kabupaten Kampar dan mewujudkan Kampar sebagai wilayah penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau.

Padahal masyarakat petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang selama ini telah menjalankan usaha budidaya secara mandiri tanpa ada campur tangan pemerintah daerah, tentunya ini bisa dijadikan pemacu motivasi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan potensi perikanan dengan mengedepan kerjasama bersama masyarakat.

Begitu juga dengan petani ikan lainnya yang memberikan informasi mengenai keberadaannya dan kebutuhannya yang diharapkan dari pemerintah daerah.

Masyarakat petani ikan budidaya di waduk PLTA Koto Panjang sebenarnya sangat berharap adanya uluran tangan dan perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar, agar mereka mendapat bantuan untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas budidaya.

Belum adanya bantuan pemerintah daerah Kabupaten Kampar terhadap para petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang tidak menyurutkan keinginan masyarakat untuk terus berusaha dan berupaya memberikan kontribusi berupa hasil ikan kepada daerah dan juga bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan keluarganya.

Seluruh petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk memberikan perhatian agar mereka mampu meningkatkan produksi ikan dan meningkatkan kualitas dari ikan yang selama ini mereka budidayakan. Bila dilihat dari data yang diberikan masyarakat rata-rata mereka menghasilkan puluhan ton ikan mas dan nila setiap bulannya yang didistribusikan keseluruh wilayah di Kabupaten Kampar dan Pekanbaru.

Hasil ini memperlihatkan adanya kecenderungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar tidak memberikan perhatian kepada petani ikan yang ada di waduk PLTA yang dianggap telah mandiri. Padahal para petani ikan sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah baik berupa adanya penyuluhan perikanan, bibit yang mudah diperoleh, maupun harga pakan yang terjangkau.

Dengan demikian jelaslah bahwa perhatian pemerintah Kabupaten Kampar terhadap para petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang sangat kurang, sehingga berbagai macam kebijakan mengenai pemberdayaan petani ikan di Kabupaten Kampar tidak pernah sampai kepada para petani yang ada di waduk PLTA Koto Panjang.

3. Memberdayakan juga dapat diartikan sebagai melindungi

Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan

mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri, yang mencakup pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan Politik (Pranarka, 1996 :208-219). Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka,serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

a. Pemberdayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan produktivitas. Seringkali masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi, karena dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak/memadai.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan.

c. Pemberdayaan Sosial Budaya

Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembeda-bedaan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama. Hal-hal yang perlu diperankan oleh pemerintah daerah dalam konteks pemberdayaan sosial budaya.

d. Pemberdayaan Psikologi

Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berpikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat

mereka sadar terhadap dirinya, dan apa yang diinginkannya dari hidup ini. Interaksi antar masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama tanpa ada yang memerintahkan dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau dikalahkan. Pemberdayaan didasarkan atas kerja sama, untuk mencapai tujuan bersama, dengan hubungan timbal balik yang saling memberdayakan.

e. Pemberdayaan Politik

Dalam pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan kepemimpinan, keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat, kesempatan menyampaikan hak suara, dan lain sebagainya.

Dari kelima komponen pemberdayaan masyarakat diatas, pemberdayaan pendidikan merupakan faktor kunci, sedangkan pemberdayaan yang lainnya yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial budaya, pemberdayaan psikologi, dan pemberdayaan politik adalah faktor Penunjang dalam memperkuat ketahanan kehidupan pada masyarakat terutama pada petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar hanya sebatas pernah memberikan bibit ikan dan pakan ikan kepada masyarakat petani dengan jumlah yang sangat terbatas dan tidak seluruh petani memperoleh bantuannya, sehingga bantuan tersebut tidak bisa memberikan sumbangan nyata bagi pemberdayaan petani secara keseluruhan.

Tidak ada bantuan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Kampar kepada para petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang dalam tahun 2014-2015, sehingga dapat dikatakan perhatian pemerintah kepada masyarakat petani ikan terutama di waduk PLTA Koto Panjang sangat kurang. Padahal keberadaan petani di waduk PLTA Koto Panjang telah membantu membuka alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan baik sebagai pemodal/pemilik keramba maupun sebagai pekerja dan juga sebagai pembuka tumbuhnya perekonomian lain di wilayah sekitar waduk.

Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Kampar menyebabkan rendahnya tingkat pemberdayaan yang diberikan kepada para petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang. Kealpaan pemerintah dalam memberikan perhatian kepada masyarakat petani ikan menyebabkan masyarakat petani ikan berjalan dengan sendirinya dan mandiri dengan bersama-sama mencari jalan keluar bila ada permasalahan yang dihadapi. Padahal masyarakat petani sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari pemerintah terutama dalam memberdayakan para petani untuk meningkatkan hasil produksi ikan, kualitas ikan, dan akses modal yang sangat diharapkan.

Di dalam menjalankan tugas dan menata kehidupan masyarakat sudah barang tentu adanya peraturan atau regulasi yang mampu mengatur dan menjadi pedoman, untuk itu hal yang terpenting apakah peraturan tersebut mampu menjawab dan memberikan manfaat yang baik bagi ruang lingkup yang diatur. Sewaktu-waktu perubahan akan terjadi disini peran dari regulasi yang di anggap sangat penting untuk senantiasa menjawab perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah yakni Dinas Perikanan Kabupaten Kampar harus mengacu pada peraturan yang telah di tetapkan, kendala saat ini adalah belum terlaksananya

Anggaran merupakan sesuatu yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan, karna pengawasan bisa berjalan dengan baik apabila ada sumber dana untuk melaksanakan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Salah satu kelemahan yang bisa dilihat saat ini di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu lemahnya para petugas menyusun anggaran dan memperjuangkan agar anggaran yang diusulkan di setuju oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, apabila ini terjadi maka vis-misi Dinas Perikanan akan sulit tercapai, untuk mengawasi pengawasan terhadap usaha bidang perikanan di Kabupaten Kampar tidak akan terlaksana selama terkendala anggaran, contohnya saja seperti pakan ikan masih di datangkan dari provinsi lain seperti dari medan, hal ini tentu menyulitkan para pengusaha di bidang perikanan di Kabupaten Kampar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang disimpulkan bahwa Pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kampar pada petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang tidak berjalan sebagaimana dengan pemberdayaan di daerah lainnya. Hal ini terlihat tidak adanya bantuan dan program yang berjalan serta diperuntukkan bagi petani ikan di waduk PLTA Koto Panjang. Pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan belum maksimal dilakukukan pemerintah daerah terutama pada potensi perikanan yang ada di waduk PLTA Koto Panjang, kurang maksimalnya biaya atau anggaran untuk pemberdayaan terhadap usaha bidang perikanan

B. Saran

Walaupun di Kabupaten Kampar telah di lakukan Pengawasan Pemerintah terhadap usaha perikanan, namun dilihat dari lapangan masih terdapat para pengusaha ikan yang belum di perhatikan oleh pemerintah khususnya di waduk PLTA Koto Panjang. Diharapkan agar semua instansi terkait baik itu dari Dinas Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, para pengusaha ikan, dan masyarakat Kabupaten Kampar agar lebih meningkatkan keinginan dalam membangun usaha perikanan yang maju sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kampar.

Penulis mengharapkan usaha perikanan di Kabupaten Kampar tetap optimal dan terus berkembang sesuai dengan visi dan misi Dinas Perikanan yang bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pusat perikanan di Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CDES.

- Marzuki, M.M. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama.
- Moleong, Lexy, J, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi*. Jakarta: Grasindo.
- Pearson, R. Scott., Gotsch, Carl dan Bahri, Sjaiful. 2003. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Rian Wahyu. 2014. *Jurnal* “Pengawasan Terhadap Usaha Bidang Perikanan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Ulb Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Perpustakaan Universitas
- Subarsono, A.G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: Media Brilian.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2008